



Judul : 4000 ASN akan dilibatkan sebagai komponen cadangan
Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

4.000 ASN Akan Dilibatkan Sebagai Komponen Cadangan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin memastikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga di Jakarta akan dilibatkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan direncanakan mulai bulan Februari pada semester pertama 2026.

"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita putuskan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjafrie, dikutip dari ANTARA, Senin (2/2/2026).

ARDI MANTO ADIPUTRA, Direktur Imparsial

Bisa Berbahaya Bagi Demokrasi & Hukum



Pemerintah berencana membangun Komcad dari ASN sebanyak 4.000 orang. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini benar-benar masalah sejuk atau perihalnya ny. Dalam konteks ASN yang akan dijadikan Komcad, pemerintah gagal memahami sekedar mengapa apakah kebijakan ini bersifat saling atau justru wajib. Ketidakjelasan ini berbahaya karena menyangkut hak warga negara.

Bagaimana jika Komcad ASN ini bersifat wajib?

Jika program ini bersifat wajib, maka secara jalinan berbahaya. Bagaimanapun Pasal 21 ayat (2) UU PSDN Nomor 23 Tahun 2019 yang secara eksplisit menyebut bahwa Komcad bersifat wajib. Projekkan wajib penerimannya dengan prinsip conscientious objection, yang hak untuk menolak penugasan militer ber-

dasarkan keyakinan, agama, atau hukum negara, yang dijamin oleh Konstitusi. Namun UU PSDN tidak secara eksplisit menggantikan conscientious objection.

Bagaimana Anda melihatnya?
Diketahui UU PSDN tidak secara eksplisit menggantikan conscientious objection, hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang tidak dapat diabaikan. Namun, hal ini berbeda dengan yang diungkapkan dalam Komcad. Hal ini diterangkan dalam Pasal 18 Komodifikasi tentang Hak Sipil dan Politik (ICCP), yang telah diratifikasi Indonesia pada 2019. Pasal 18 PSDN mengatakan bahwa Komcad merupakan wajib yang menekankan pemimpinan militer dengan ancaman pidana, yang jelas bertentangan dengan standar HAM internasional.

Bukankah ASN berkaitan dengan

pelayanan publik, bukan pertahanan? ASN pada dasarnya berorientasi pada urusan-urusan sipil, seperti pelayanan publik dan administrasi. Komcad tidak dihasilkan sebagai alat pertahanan negara. Mewajibkan ASN menjadi Komcad merupakan bentuk nyata konservasi ruang sipil, yang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan prinsip negara hukum.

Alasan paling serius dari kejadian ini?

Catatan paling krusial adalah risiko normalisasi kehadiran militer di ruang sipil. Melalih ASN dalam skema Komcad itu semestinya sudah berlangsung sejak dulu. Ini merupakan bagian dari kebebasan dan kesejahteraan warga negara. Apalagi ASN itu aparatur negara, jadi sangat wajar kalau mereka dilibatkan.

Sesungguhnya pihak memiliki kebijakan ini berlebihan. Apa pendapat Anda?

Saya kira tidak berlebihan. Komcad ini disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu, seperti perang, bencana, dan sebagainya. Jika memang kebutuhan pertahanan negara menginginkan pendekatan militer sebagai solusi instan atas persoalan tata kelola pemerintahan, maka memang kewajiban dalam agenda reformasi sektor keamanan. ■ REN

Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti kegiatan retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Pertahanan) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/1/2026).

Menurut Sjafrie, pelibatan ASN dalam Komcad bertujuan untuk membumikan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa cinta Tanah Air dalam pengabdian kepada

negara. Program ini menyasar ASN berusia 18 hingga 35 tahun yang akan mengikuti pelatihan dasar militer.

Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan dasar tersebut, para ASN akan dikembalikan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan tugas dan fungsinya utamanya sebagai pelayan publik.

Sjafrie menjelaskan, pelatihan Komcad ASN akan dilaksanakan secara bertahap. Skema pelatihan dibagi per triwulan agar dalam satu semester pertama pemerintah sudah memiliki jumlah komponen

cadangan yang memadai.

"Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya," ujar Sjafrie.

Rencana pelibatan ASN sebagai Komcad ini menjadi bagian dari kebijakan pertahanan negara yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

Mantan pimpinan Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha mengatakan, aturan tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan sudah sesuai. Sebenarnya Komcad itu semestinya sudah berlangsung dari dulu. Itu merupakan bagian dari bela negara. Sebagai seorang Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menilai kebijakan tersebut bermasalah sejak dari aspek hukum hingga dampaknya terhadap demokrasi. Berikut petikan wawancara dengan Syaifullah Tamliha dan Ardi Manto Adiputra terkait rencana 4.000 ASN dilatih Komcad.

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi I DPR RI

Banyak Negara Maju Berlakukan Aturan Ini



“
Indonesia memiliki sejarah kalem terkait keterlibatan militer dalam urusan-urusan masyarakat sipil. Karena itu, kebijakan seperti ini seharusnya dihindari.

“
Saya kira tidak berlebihan. Komcad ini disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu, terutama jika negara berada dalam keadaan darurat atau perang.

lalu identik dengan perang?

Tidak. Pertahanan negara itu luas. Bukan hanya soal perang, tapi juga bagian dari persiapan dalam menghadapi kedisiplinan dan semangat bela negara. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan negara, dan Komcad adalah salah satu instrumenanya.

Ada juga yang mempersoalkan jika Komcad dari ASN ini jadi dilaksanakan. Menurut Anda, tidak adil atau tidak?

Tidak, ada masalah. Anggarannya sudah disiapkan dan dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi secara administrasi dan keuangan sudah clear.

Bagaimana jika Komcad ini tidak selesai?

Kalau sejauh saya tahu, biasanya program seperti ini tidak akan jalan. Tidak jadi-jadi dan akhirnya tidak ter-

laksana. Lagi pula ASN itu dibayai oleh negara. Jadi wajar kalau negara juga meminta kontribusi mereka dalam konteks pertahanan.

Banyak yang membandingkan Komcad dengan wajib militer. Apakah itu benar?

Kurang lebih memang dilihat seperti wajib militer. Banyak negara maju juga sudah memberlakukan wajib militer dalam sistem cadangan. Tadi juga bukan hal yang singkat dalam konteks pertahanan negara.

Bagaimana dengan pola dan bentuknya?

Tentu kita berharap pelatihan Komcad dilakukan bersamaan TNI dengan standar latihan militer. Tapi hal ini disesuaikan juga. Dari segi teknis, kita tidak perlu mengikuti standar militer. Karena sejauh saya tahu, biasanya program seperti ini tidak akan jalan. Tidak jadi-jadi dan akhirnya tidak ter-